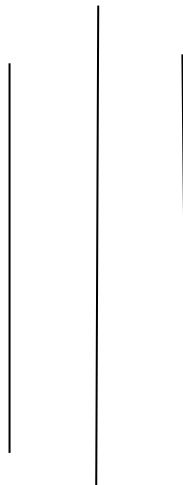




LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN V TS 2022-2023
DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR DAN
TRANSPORTASI KE PROVINSI SULAWESI TENGAH
TANGGAL 14 – 18 JULI 2023**



KOMISI V DPR-RI

JAKARTA, 2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
I.1. Dasar Hukum	3
I.2. Maksud dan Tujuan.....	3
I.3. Lokasi dan Waktu.....	4
I.4. Agenda Kunjungan.....	4
II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN.....	5
II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan	5
II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi	15
III. PENUTUP.....	177
LAMPIRAN.....	188
Dokumentasi Kegiatan	188



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI
KE PROVINSI SULAWESI TENGAH
TANGGAL 14 – 18 JULI 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 16 Mei 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

- a. Untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan program dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya melalui APBN.

Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu:

butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*

butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:"

butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 – 2023 tanggal 14 – 18 Juli 2023, yang dipimpin oleh **Bapak H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si (A-130/F-Gerindra/Dapil Sulsel II)**.

I.4. Agenda Kunjungan

Agenda kegiatan dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan lokasi penataan kawasan pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi di Kelurahan Petobo;
2. Peninjauan hunian tetap masyarakat terdampak gempa bumi dan likuifaksi;
3. Peninjauan pengendalian banjir di Desa Bangga, Kabupaten Sigi
4. Pertemuan dengan Bupati Sigi, Bupati Poso, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI membahas terkait program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan likuifaksi, serta membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah.

II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan

Beberapa temuan dan permasalahan serta usulan yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 – 2023, adalah sebagai berikut:

a. Kementerian PUPR

- **Usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**

Beberapa usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait Kementerian PUPR yaitu sebagai berikut:

- **Bidang Sumber Daya Air**

Sektor Irigasi dan Rawa:

- 1) Pembangunan Daerah Irigasi Wosu di Kabupaten Morowali
 - i. Pekerjaan Saluran Primer;
 - ii. Pekerjaan Saluran Sekunder
- 2) Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Ongka Atas di Kabupaten Parigi Moutong;
- 3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Toili di Kabupaten Banggai;
- 4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Maoti di Kabupaten Parigi Moutong;
- 5) Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Tendelalos di Kabupaten Toli-Toli;
- 6) Pembangunan Daerah Irigasi Ula
 - i. Pekerjaan Saluran Primer
 - ii. Pekerjaan Saluran Sekunder
- 7) Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Bella
 - i. Pekerjaan Bendung Bella
 - ii. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Primer
 - iii. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder
- 8) Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Tada
 - i. Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Tada
 - ii. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder
- 9) Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Mepanga Hilir
 - i. Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Suplesi Tirtasari
 - ii. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder

Sektor Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku:

- 1) Perkuatan Tebing dan Normalisasi Sungai Bosagon WS. Lambunu Buol di Kabupaten Parigi Moutong;
- 2) Pembangunan Tanggul Sungai Mansahang dan Moilong WS. Bongka Mentawa.

- **Bidang Bina Marga**

Usulan penanganan ruas jalan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah:

- 1) **Pembangunan Jalan Ruas Palu Parigi *bypass***, dimana pembangunan jalan ini sebagai jalur alternative penghubung dari Kota Palu ke Kabupaten Parigi Moutong (lintas tengah Sulawesi) tanpa membebani jaringan jalan dalam kota Palu;
- 2) **Rencana Pembangunan Jalan Tambu - Kasimbar**, untuk mendukung akses menuju IKN;
- 3) **Pembangunan Jalan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu**, dimana KEK Palu merupakan kawasan pertama yang didesain oleh pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi;
- 4) **Rekonstruksi Jalan Ruas Tonusu – Pendolo**, dimana Ruas Jalan Tonusu –Pendolo tersebut merupakan akses kawasan pangan Kabupaten Poso.

Usulan penanganan jalan strategis daerah yang mendukung tercapainya RPJM Nasional di Sulawesi Tengah:

- 1) Rekonstruksi Jalan Ruas Longge Atas – Dataran Bulan;
- 2) Rekonstruksi Jalan Ruas Dataran Bulan – Uemea;
- 3) Rekonstruksi Jalan Ruas Pangkalaseang – Balantak;
- 4) Rekonstruksi Jalan Ruas Beteleme – Nuha (bts. Sulsel);
- 5) Rekonstruksi Jalan Ruas Kolonedale – Tambayoli (Tamainusi – Towi);
- 6) Rekonstruksi Jalan Ruas Tonusu – Pendolo;
- 7) Rekonstruksi Jalan Ruas Watumaeta – Sangginora;
- 8) Rekonstruksi Jalan Ruas Barati – Tomata;
- 9) Rekonstruksi Jalan Ruas Sp. Buatan – Bilo.

Adapun daftar usulan penanganan ruas Jalan Provinsi melalui Mekanisme anggaran DAK Tahun 2024:

- 1) Ruas Tonusu – Pendolo di Kabupaten Poso;
- 2) Ruas Barati – Tomata di Kabupaten Morowali Utara;
- 3) Ruas Buatan – Bilo di Kabupaten Tolitoli;
- 4) Ruas Jembatan Oyom Limpas 1 di Kabupaten Tolitoli;
- 5) Ruas Baliangara – Longge Atas di Kabupaten Banggai;
- 6) Ruas Kalawara – Kulawi di Kabupaten Sigi;
- 7) Ruas Kulawi – Gimpi di Kabupaten Sigi.

- **Bidang Cipta Karya**

Sektor Air Minum dan Air Limbah:

- 1) Pembangunan SPAM Kawasan Perbatasan Batudaka Kec. Batudaka;
- 2) Pembangunan SPAM Kawasan Perbatasan Tindantanah Kec. Pamona Selatan;
- 3) Pembangunan Spam Regional Malei Kec. Lage dan Kec. Tojo Barat;
- 4) Pembangunan SPAM Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- 5) Pembangunan SPALD Desa Sendana.

Sektor Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung:

- 1) Lansekap/Ruang Terbuka Hijau Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah.

- **Bidang Perumahan**

Saat ini masih terdapat sekitar 40,39% rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian tidak layak, dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh berdasarkan empat aspek minimal kelayakan hunian yang meliputi ketahanan bangunan, luas lantai per kapita serta akses terhadap air minum dan sanitasi layak. Adapun rincian yang perlu penanganan yaitu sebagai berikut:

- 1) Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
- 2) Desa Jaya Bhakti Kec. Pagimana;
- 3) Desa Moilong Kec. Moilong;

- 4) Desa Labota Kec. Bahodopi;
- 5) Kelurahan Bonesompe Kec. Poso Kota Utara;
- 6) Desa Wani II;
- 7) Kelurahan Kabonga Kecil;
- 8) Desa Tosale Kec. Banawa Selatan;
- 9) Kawasan Pelabuhan Leok I Kec. Biau;
- 10) Kawasan Kelurahan Kumaligan Kec. Biau;
- 11) Kelurahan Kampal RT 8, 9;
- 12) Desa Labuan Kec. Ratolindo;
- 13) Desa Tayawa Kec. Tojo;
- 14) Desa Bahari Kec. Tojo;
- 15) Kelurahan Lolu Utara Kec. Palu Timur;
- 16) Kelurahan Silae Kec. Ulujadi;
- 17) Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore.

- **Usulan Pemerintah Kabupaten Sigi**

Beberapa usulan Pemerintah Kabupaten Sigi terkait Kementerian PUPR yaitu sebagai berikut:

- **Bidang Sumber Daya Air**

- 1) Normalisasi Sungai dan Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Sopu Kec. Nokilalaki;
- 2) Normalisasi Sungai dan Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Mewe Kec. Kulawi Selatan;
- 3) Normalisasi Sungai dan Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Saluki Kec. Gumbasa;
- 4) Normalisasi Sungai dan Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Saluri Kec. Dolo Selatan;
- 5) Normalisasi Sungai dan Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Sambo Kec. Dolo Selatan;
- 6) Normalisasi Sungai dan Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Palu (DAS Palu Wilayah Desa Pandera – Desa Kaleke);

- 7) Normalisasi Sungai dan Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Bangga (Lanjutan Kanal Sabo Dam Bangga), dimana Sabo Dam telah selesai, tersisa kanal banjir ke arah hilir belum ada penanganan;
- 8) Normalisasi Sungai dan Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Poi (Lanjutan Kanal Sabo Dam Poi), dimana Sabo Dam telah selesai, tersisa kanal banjir ke arah hilir belum ada penanganan.
- 9) Sedimentasi di Sabodam Bangga masih terus terjadi, oleh karena itu perlu penyelesaian. Sabo Dam Bangga sampai Sambo harus berkesinambungan, sehingga dapat menyelesaikan masalah.
- 10) Kawasan sungai Palu yang menjadi langganan banjir, agar ditangani sehingga tidak dilanda banjir kembali
- 11) Diperlukan penanganan segera terhadap sungai di Rumah Sakit Sigi.

- **Bidang Bina Marga**

- 1) Peningkatan Jalan Gimpu – Peana;
- 2) Peningkatan Jalan Peana – Kalamanta;
- 3) Peningkatan Jalan Kalamanta – Seko

Berdasarkan usulan Pemda Sigi ke Kementerian PUPR status saat ini sudah dimasukan dalam rencana umum Jalan Nasional, study kelayakan sudah dibuat, dan saat ini melalui usulan Inpres No 8 sudah dimulai pembangunan beberapa *box culvert*. Penanganan lanjutan dibutuhkan percepatan untuk perkerasan *aspalt*.

- **Bidang Cipta Karya**

- 1) Rehabilitasi Sarana Air Bersih Hunian Tetap Bangga;
- 2) Pembangunan Sarana Air Bersih Hunian Tetap Tuva;
- 3) Pembangunan Sarana Air Bersih Hunian Tetap Poi.

- **Bidang Perumahan**

- 1) Pembangunan baru Rumah Layak Huni di Desa Kotarindau 54 unit;
- 2) Pembangunan baru Rumah Layak Huni di Desa Kalukubula 106 unit;
- 3) Pembangunan baru Rumah Layak Huni di Desa Sidondo I 50 unit;

- 4) Pembangunan baru Rumah Layak Huni di Desa Uemanje 104 unit;
- 5) Pembangunan baru Rumah Layak Huni di Desa Sibalaya Barat 164 unit;
- 6) Pembangunan baru Rumah Layak Huni di Desa Sibalaya Utara 67 unit.

- **Usulan Pemerintah Kabupaten Poso**

Beberapa usulan Pemerintah Kabupaten Poso terkait Kementerian PUPR sebagai berikut:

- **Bidang Sumber Daya Air**

- 1) Sungai Samarela di Poso kerap terjadi banjir yang meluap ke jalan nasional, sehingga perlu penanganan.
- 2) Beberapa Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Kementerian PUPR RI dalam kondisi tidak berfungsi baik karena adanya kerusakan dan endapan lumpur sehingga perlu segera mendapat penanganan agar dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian bagi masyarakat di Daerah Irigasi tersebut. Adapun usulan terkait rehabilitasi jaringan irigasi adalah sebagai berikut:
 - i. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Panjo;
 - ii. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kilo Atas;
 - iii. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Salo;
 - iv. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gelata;
 - v. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Nandalo;
 - vi. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Watumaeta;
 - vii. Pembangunan Tanggul pengendali Banjir Sungai Tambarana.

- **Bidang Bina Marga**

- 1) Terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah TA 2023, adapun daftar usulan jalan daerah Kabupaten Poso TA 2023 yaitu sebagai berikut:
 - i. Rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan Wuasa – Alitupu sepanjang 3,97 km, dengan kemantapan jalan 9,2%;
 - ii. Rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan Maholo – Watutau sepanjang 3,63 km, dengan kemantapan jalan 48,4%;

- iii. Rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan Sangira – Trans Lena – Uelincu sepanjang 12,12 km, dengan kemantapan jalan 38,16%;
 - iv. Rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan Pinedapa – Padalembara sepanjang 9,12 km, dengan kemantapan jalan 31,4%.
- 2) Jalan Tentena – Korobono di Kec. Pamona Puselemba – Kec. Pamona Selatan;
 - 3) Jalan Doda – Lelio di Kec. Lore Tengah – Kec. Lore Selatan;
 - 4) Jalan Wuasa – Doda di Kec. Lore Utara – Kec. Lore Tengah;
 - 5) Jalan Tambarana – Pantai di Kec. Poso Pesisir Utara;
 - 6) Jalan Sawidago – Kuku di Kec. Pamona Utara;
 - 7) Jalan Lawanga – Bukit Bambu – Sayo di Kec. Poso Kota Utara – Kec. Poso Kota Selatan;
 - 8) Jalan Wuasa – Alitupu di Kec. Lore Utara;
 - 9) Jalan Maholo – Watutau di Kec. Lore Timur – Kec. Lore Peore;
 - 10) Jalan Pendolo – Pandajaya di Kec. Pamona Selatan;
 - 11) Jalan Mapane – Betania – Malitu di Kec. Poso Pesisir – Kec. Poso Pesisir Selatan;
 - 12) Jalan Pandiri – Malitu – Patiwunga di Kec. Lage – Kec. Poso Pesisir Selatan;
 - 13) Jalan Kilo – Kilo Trans di Kec. Poso Pesisir Utara;
 - 14) Jembatan Poso 3 (Lembomawo – Tagolu) di Kec. Poso Kota Selatan – Kec. Lage;
 - 15) Jembatan Uelene di Kec. Pamona Selatan;
 - 16) Jembatan Kolori – Lengkeka di Kec. Lore Barat.

- Bidang Cipta Karya

1) Sektor Air Minum

Potensi sumber air yang akan digunakan masyarakat sangat baik, namun belum didukung dengan sistem yang baik sehingga belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Adapun usulan terkait sektor air minum yaitu sebagai berikut:

- i. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Barati Kec. Pamona Tenggara;
- ii. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Toini Kec. Poso Pesisir;
- iii. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kel. Sayo Kec. Poso Kota Selatan;
- iv. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kalora Kec. Poso Pamona Selatan;
- v. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mayasari Kec. Pamona Selatan;
- vi. Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Poso;
- vii. Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Tentena;
- viii. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Salukaia Kec. Pamona Barat
- ix. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tomehipi Kec. Lore Barat.

2) Sektor Sanitasi

Belum adanya tangki septik yang layak pada sebagian rumah masyarakat utamanya di wilayah perdesaan mengakibatkan masih tingginya angka BABS di 102 Desa/kelurahan di Kabupaten Poso. Adapun usulan terkait sektor sanitasi yaitu sebagai berikut:

- i. Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan di 2 kecamatan;
- ii. Pembanguann Tangki Septik Individual Perdesaan di 8 kecamatan.

b. Kementerian Perhubungan

- Usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah:
 - 1) Diperlukan dukungan terkait rencana jalur Tambu – Kasimbar melalui Pelabuhan Tambu – Kasimbar, sehingga dapat mempermudah akses antara kawasan timur dan kawasan barat, serta akses menuju IKN;
 - 2) Mengusulkan agar Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi bandara Internasional untuk kepentingan embarkasi haji dan pariwisata
 - 3) Perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk pengembangan terminal pelabuhan penyeberangan Taipa menuju IKN;

4) Terkait wacana Terusan Khatulistiwa masih perlu dikaji, dan apabila didukung oleh pemerintah pusat akan dicarikan investor dan akan dibuat dokumen perencanaan.

- Pemerintah Kabupaten Poso mengusulkan agar Bandara Poso dapat diaktifkan kembali, sehingga dapat membuka keterisolasian, memajukan pariwisata di Poso, serta mengubah imej Kabupaten Poso pasca kerusuhan.

c. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

- Terhadap daerah tertinggal yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tojo Upa-Upa, perlu dilakukan evaluasi dan dapat dikeluarkan dari status daerah tertinggal.
- Provinsi Sulawesi Tengah masih membutuhkan program-program pemberdayaan masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

d. BMKG

- Diperlukan penambahan peralatan monitoring kegempaan di Sulawesi Tengah;
- Perlu untuk meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang aman dari ancaman potensi bencana.

e. BNPP/BASARNAS

- Diperlukan peningkatan kelengkapan alat SAR di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu untuk mendukung pencarian dan pertolongan di wilayah sekitar IKN;
- Diperlukan peningkatan status Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, dari kantor kelas B menjadi kelas A;
- Diperlukan penambahan jumlah personil dan pemenuhan pengadaan perluasan lahan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu.

f. Pertemuan Komisi V DPR RI dengan Bupati Sigi, Bupati Poso, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI

Beberapa poin-poin utama yang menjadi diskusi dan perlu menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dalam pertemuan ini, antara lain:

- 1) Terkait dengan rencana pembuatan *memorial garden* di lokasi pasca bencana likuifaksi di Kelurahan Petobo, agar dapat dilakukan perencanaan yang matang dan komprehensif, mulai dari penataannya sampai sumber pendanaannya, sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.
- 2) Di satu sisi, masyarakat meminta agar jalan akses dapat dibuka kembali, namun disisi lain daerah tersebut merupakan zona merah. Kementerian PUPR perlu mengambil langkah strategis. Akses jalan di lokasi pasca bencana likuifaksi di Kelurahan Petobo perlu menjadi perhatian khusus, karena selama ini masyarakat harus berputar jauh.
- 3) Terkait dengan Hunian Tetap, ada kurang lebih 100 KK yang belum mau menempati hunian yang telah disiapkan oleh Kementerian PUPR. Harus diperhatikan fasos dan fasumnya, dan penggunaan anggaran yang berasal dari *loan* harus benar-benar efektif.
- 4) Selain itu, sampai saat ini Hunian Tetap yang sudah selesai masih sekitar 60%, dimana sudah lebih dari 4 tahun masih banyak masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara. Agar penyelesaian permasalahan ini dapat menjadi perhatian Kementerian PUPR.
- 5) Terkait dengan pelaksanaan Inpres tentang Jalan Daerah, harus dilakukan secara berkeadilan dan merata.
- 6) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah harus dipercepat penyelesaiannya dan ditangani secara tuntas, dimana saat ini sudah hampir 5 tahun pasca bencana terjadi.
- 7) Perlu untuk memperhatikan aspek-aspek keselamatan dalam pembangunan kembali rumah warga maupun fasilitas ruang publik. Agar struktur yang digunakan dapat meminimalisir resiko bencana.
- 8) Penanganan sungai di Rumah Sakit Sigi menjadi salah satu yang paling mendesak untuk segera dilakukan.
- 9) Terhadap wacana Terusan Khatulistiwa, dapat menghubungkan daerah barat dan daerah timur, dan apabila terealisasi akan menjadi hal yang baru dan baik untuk kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah.

- 10) Masih terdapat 2 daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah, untuk itu perlu agar dievaluasi dan dikeluarkan dari status daerah tertinggal.
- 11) Pemberdayaan pengusaha lokal pada paket-paket pekerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat minim, dan mayoritas dikuasai oleh BUMN. Perlu ada regulasi yang dapat mengayomi para pengusaha lokal, sehingga paket-paket pekerjaan yang kecil dapat dilaksanakan oleh pengusaha lokal.
- 12) Bandara yang sudah ada harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal, untuk itu pengaktifan kembali Bandara Poso agar dapat menjadi perhatian.

II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 – 2023 ke Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain:

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana gempa dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk Hunian Tetap beserta fasum dan fasosnya.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk melanjutkan penyelesaian penanganan banjir dari hulu sampai ke hilir di Kabupaten Sigi, sehingga dapat tuntas secara keseluruhan.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan pemanfaatan bandara yang ada, termasuk dengan pengaktifan kembali Bandara Poso untuk membuka keterisoliran dan memajukan pariwisata Kabupaten Poso.
4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk memberikan ruang dan melibatkan penyedia jasa lokal dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan Basarnas untuk meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pengentasan daerah tertinggal, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Terkait sejumlah usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Sigi, dan Pemerintah Kabupaten Poso yang disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Komisi V DPR RI mendukung usulan pembangunan infrastruktur yang berada dalam lingkup tugas dari Mitra Kerja Komisi V DPR RI dengan mengedepankan aspek-aspek skala prioritas, akuntabilitas, dan memberikan *output* dan *outcome* yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 – 2023 ke Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 18 Juli 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan untuk dapat ditindaklanjuti Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

KETUA TIM

ttd

H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE., M.Si
No. Anggota: A-130

LAMPIRAN
Dokumentasi Kegiatan



















